

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dapat diukur atau dilihat dari adanya kebijakan pemerintah di tingkat pusat, akan tetapi diperlukan dukungan kebijakan setiap pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu indikator penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional ini adalah perubahan pola pikir dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pada berbagai aspek kehidupan. Misalnya, meningkatnya akses dan partisipasi di bidang pendidikan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam bidang hukum dan HAM, sehingga dalam pelaksanaannya mampu menurunkan angka kriminalitas dan mewujudkan penegakkan HAM, serta praktik demokrasi yang sehat hingga di kalangan grassroot. Kondisi demikian ini akan menciptakan stabilitas sosial dan politik, sehingga berdampak pada stabilisasi berbangsa dan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya gambaran tolok ukur keberhasilan pembangunan di atas masih jauh dari harapan kita semua, khususnya terkait dengan pelaksanaan Instruksi Presiden (INPRES) No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Dalam Inpres tersebut, didefinisikan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dengan menggunakan dasar INPRES ini setiap lembaga dan satuan kerja dari tingkat pusat sampai daerah mampu membuat perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang responsif gender. Inpres No. 9/2000 diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri ini sebagai landasan operasional pelaksanaan pengarusutamaan gender pada setiap daerah, di mana integrasi kesetaraan gender dalam setiap satuan kerja (Satker) di seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Salah satu tujuan pembangunan pada era millenium Millenium Development Goals (MDG's) adalah menuju kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Akan tetapi masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index atau GDI) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index atau GEM). Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. Angka GEM dan GDI Indonesia termasuk terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Hal ini berarti ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah yang akan dihadapi di masa mendatang.

Konferensi Perempuan Sedunia, Beijing 1995, menghasilkan perlunya langkah-langkah penting dilakukan menindak lanjuti Kesepakatan Beijing, yaitu bagaimana melaksanakan *mainstreaming of gender issues*. Dibidang data semua negara peserta sepakat membangun data terpilah/gender statistik, informasi yang dibutuhkan perencanaan dan evaluasi menghasilkan dan mendesiminasi gender terpilah menurut jenis kelamin dan gender statistic. Banyak negara mulai mempersiapkan pengumpulan dan publikasi gender statistik 1(meskipun masih ada kerancuan antara data terpilah menurut jenis kelamin dengan gender statistic)

Data terpilah menurut jenis kelamin dapat dipakai antara lain untuk: (i) Identifikasi perbedaan (kondisi/progress) keadaan perempuan dan laki-laki dalam tempat dan waktu (ii) Dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki (Evaluasi, monitor, outcome menurut jenis kelamin), (iii) Informasi dan dampak dari suatu keadaan (seperti ketika krisis ekonomi, bencana, dst), (iv) Identifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki, (v) Alokasi sumberdaya yang adil, (vi) Merupakan input penting untuk melakukan gender analisis; dengan memformulasi dan memonitor kebijakan dan perencanaan, sebagai alat penting dalam promosi dan memonitor kemajuan kesetaraan gender, dan menyediakan bukti berdasarkan atas keadaan nyata situasi perempuan dan laki-laki secara lebih lengkap, serta memahami kontribusi ekonomi, keadaan dan realitas sesungguhnya kehidupan perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut diatas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terpilah menurut jenis kelamin, pada semua bidang pembangunan yang strategis dan menjadi bagian program yang dilakukan secara rutin dan dikemas dalam buku "Profil Gender Kabupaten Sidenreng Rappang".

1.2. Tujuan Penulisan

Dalam rangka menyelenggarakan perencanaan pembangunan yang responsive gender diperlukan data yang menggambarkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran secara statistic mengenai kesenjangan gender dalam bidang demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan keluarga berencana, dan kesejahteraan dan perlindungan anak serta permasalahan lain yang dihadapi perempuan dan laki-laki khususnya dalam kehidupan berbangsa bernegara.

Data ini diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna untuk menyusun perencanaan pembangunan yang responsive gender yaitu perencanaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

1.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam profil gender ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai survei dan sensus yang berasal dari Badan Pusat Statistik, dan data sektor terkait.

1.4. Sistematika Penyajian

Buku Profil Gender Kabupaten Sidenreng Rappang 2017 ini terdiri dari Sembilan (9) bab Yaitu: (i) Pendahuluan, (ii) Demografi, (iii) Pendidikan, (iv) Kesehatan, (v) Ketenagakerjaan, (vi) Sosial dan KB, (vii) Sektor Publik, (viii) Kekerasan Terhadap Perempuan, (ix) Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

BAB II DEMOGRAFI

2.1. Pendahuluan

Penduduk dengan berbagai aspeknya mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan. Penduduk, baik perempuan maupun laki-laki, merupakan alat atau sarana bagi penduduk untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selayaknya berspektif gender. Namun demikian, baik beberapa peraturan perundangan dan kehidupan di dalam masyarakat masih terdapat praktek-praktek diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Dewasa ini, data tentang demografi semakin banyak diperlukan oleh berbagai pihak, yang tidak saja sebagai data pendukung, tetapi juga sebagai input maupun output dari suatu kegiatan. Berkaitan dengan pembangunan gender perlu diperhatikan mengenai besaran, komposisi dan struktur umur penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai dasar perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

2.2. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Table 2.1 menunjukkan secara absolute jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 286.610 jiwa meningkat menjadi 289.787 jiwa pada tahun 2016, atau mengalami peningkatan sekitar 3.177 jiwa dalam kurun waktu 1 tahun. Sementara apabila dilihat dari komposisi penduduk laki-laki dan perempuan, pada tahun 2016 jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dari pada penduduk laki-laki yaitu 149.708 perempuan dan 143.277 laki-laki. Namun demikian secara umum perbandingan jumlah penduduk laki-laki perempuan jumlahnya seimbang. Penduduk laki-laki dan perempuan tentu akan menjadi

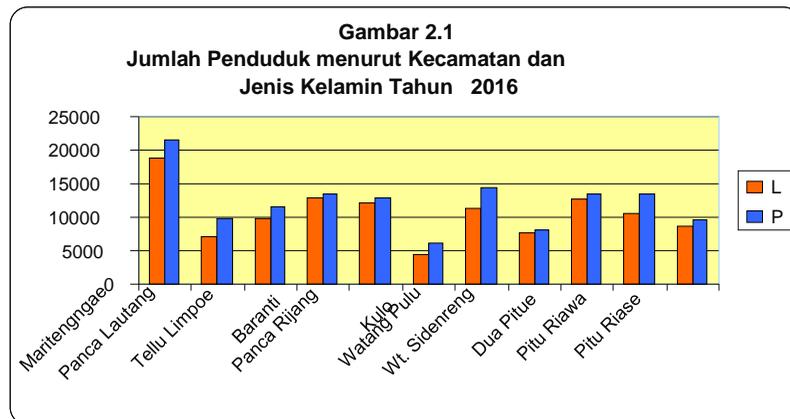
potensi yang sama dalam rangka kemajuan bangsa dan Negara, sasaran peningkatan kualitas SDM ditujukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil dan merata.

Table 2. 1
Jumlah Penduduk menurut kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

NO	KECAMATAN	2016	
		L	P
1.	Maritengngae	24.080	25.483
2.	Panca Lautang	8.364	8.878
3.	Tellu Limpoe	11.223	12.359
4.	Baranti	14.415	15.348
5.	Panca Rijang	13.727	14.656
6.	Kulo	5.875	6.156
7.	Watang Pulu	16.971	17.264
8.	Wt. Sidenreng	8.716	8.987
9.	Dua Pitue	14.013	14.762
10.	Pitu Riawa	12.833	13.151
11.	Pitu Riase	11.371	11.155
JUMLAH		141.588	148.199

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang 2016

Dengan demikian apabila melihat tabel diatas bahwa jumlah penduduk perempuan dan penduduk laki-laki hampir seimbang jumlahnya, untuk itu semakin jelas perlunya kebijakan untuk mengintegrasikan isu-isu gender kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dengan memastikan akses, partisipasi, control dan manfaat atas pembangunan secara seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



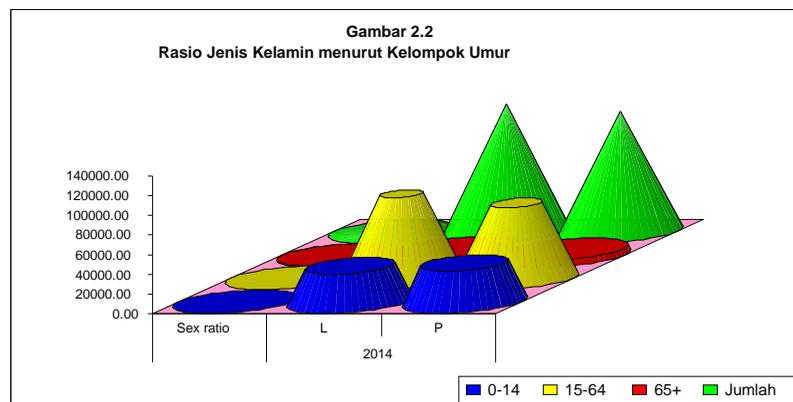
Sedangkan rasio jenis kelamin menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Table 2.2
Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

NO	KECAMATAN	2016		JUMLAH	SEX RATIO
		L	P		
1.	Maritengngae	24080	25483	49563	94,49
2.	Panca Lautang	8364	8878	17242	94,21
3.	Tellu Limpoe	11223	12359	23582	90,81
4.	Baranti	14415	15348	29763	93,92
5.	Panca Rijang	13727	14656	28363	93,66
6.	Kulo	5875	6156	12031	35,44
7.	Watang Pulu	16971	17264	34235	98,30
8.	Wt. Sidenreng	8716	8987	17703	96,98
9.	Dua Pitue	14013	14762	28775	94,93
10.	Pitu Riawa	12833	13151	25984	97,58
11.	Pitu Riase	11371	11155	24526	101,94
		141588	148199	289787	95,54

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang 2016

Pada tabel 2.2 menunjukkan bahwa 40.964 penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang berusia muda (umur 0-14 tahun), 100.624 berusia produktif (umur 15- 64 tahun), dan hanya 8.457 berumur 65 tahun keatas. Sehingga berdasarkan angka mutlaknya diperoleh angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 49,11 Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 orang lebih penduduk usia tidak produktif. Semakin besar angka ketergantungan, maka besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, berarti semakin besar hambatan atas upaya perkembangan daerah. Hal ini juga dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini.



Tabel 2.3
Distribusi penduduk Menurut Kelompok Umur
Tahun 2015-2016

NO	KELOMPOK UMUR	2015		2016	
		P	L	P	L
1	0- 4	13150	13874	13142	13890
2	5- 9	12521	13349	12558	13413
3	10-14	12436	13700	12338	13661
4	15-19	11955	12819	11963	12937
5	20-24	10830	10814	10902	11003

6	25-29	11837	11298	11891	11422
7	30-34	11328	10314	11266	10307
8	35-39	11295	10157	11357	10185
9	40-44	10447	9867	10547	9974
10	45-49	9843	8711	10098	8991
11	50-54	8130	6806	8423	7074
12	55-59	6641	5411	6879	5600
13	60-64	5219	4494	5397	4654
14	65-69	4293	3419	4384	3560
15	70-75	3297	2433	3374	2488
16	75 +	3582	2340	3680	2409
	JUMLAH	145293	146804	280279	153475

Sumber : BPS Sidenreng Rappang 2016

Komposisi penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2016 jika dirinci menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan frekuensi terbesar berada pada kelompok umur 10-14 tahun dan 15-19 tahun, dan pada kelompok umur ini atau kelompok umur anak 0-18 tahun anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan, kemudian kelompok umur 20-49 tahun penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Dalam usia lanjut usia (60 tahun keatas) penduduk perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki, hal ini terkait dengan usia harapan hidup perempuan lebih panjang dari pada laki-laki.

BAB III BIDANG PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: social, ekonomi, politik, dan budaya. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sangat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan disemua jenjang pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak(TK) sampai tingkat Sekolah menengah umum (SMU). Kebijakan tersebut secara paralel harus diikuti dengan kebijakan lain yang dapat memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memperoleh manfaat dari gratisnya biaya pendidikan tersebut. Pendidikan untuk semua harus benar-benar terwujud secara nyata dan dirasakan oleh semua kelompok masyarakat dan golongan, termasuk **perempuan dan anak, terutama anak perempuan.**

3.1. Jumlah Murid (SD,SLTP,SMU)

Tahun 2016 jumlah murid anak perempuan terhadap anak laki-laki di semua jenjang pendidikan, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, bahkan pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), jumlah anak perempuan lebih banyak, yang berarti proporsi anak perempuan lebih tinggi dibanding anak laki-laki. (tabel.3.1).

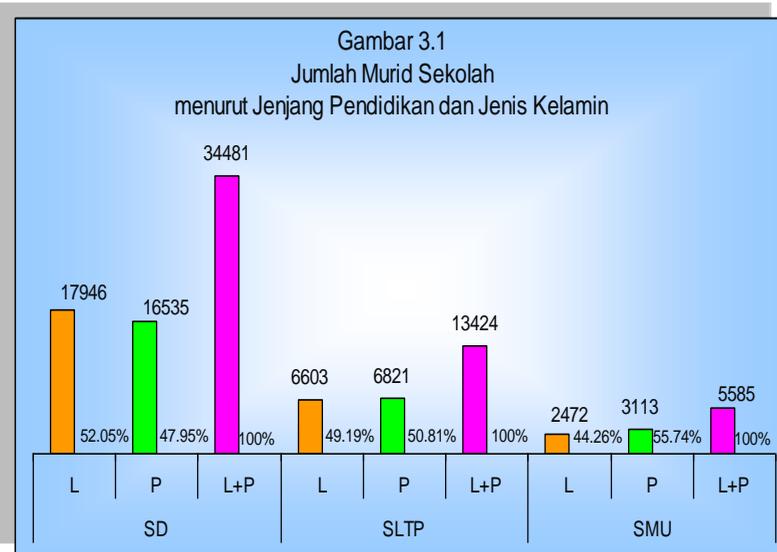
Tabel 3.1

**Jumlah Murid (SD, SLTP, SMU) menurut Kecamatan,
Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan
Tahun 2016**

NO	KECAMATAN	SD		SLTP		SMU	
		L	P	L	P	L	P
1	Maritengngae	2748	2977	1587	1092	1684	1825
2	Panca.lautang	936	1.016	503	546	262	285
3	Tellu Limpoe	1157	1254	590	640	213	231
4	Baranti	1546	1675	1119	1214	263	285
5	Panca Rijang	1704	1848	1008	1092	1315	1426
6	Kulo	614	666	233	253	147	161
7	Watang Pulu	1804	1956	574	623	596	646
8	Wt. Sidenreng	894	969	451	489	10	13
9	Dua Pitue	1626	1763	765	829	180	195
10	Pitu Riawa	1539	1668	658	714	180	195
11	Pitu Riase	1210	1312	411	447	93	99
JUMLAH		15.778	17.104	7.899	8567	5001	5424

Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2016

Hal ini juga dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini



Jumlah murid pada tingkat sekolah Dasar adalah paling tinggi dibanding jenjang pendidikan SLTP dan SMU. Jumlah murid SD tahun 2016 sebesar 32.892 yang terdiri dari 17.163 (laki-laki) dan 15.719 (perempuan), dimana tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan.

3.2. Angka Buta huruf

Apabila kita mencermati secara rinci data Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap tahun 2016 (tabel 3.2), masih ada terdapat Kecamatan yang angka buta huruf masih tinggi. Kondisi ini terjadi pada Kecamatan Dua Pitue yaitu 150 dan Kecamatan Kulo yang paling rendah yaitu 20 buta hurufnya, kondisi ini diduga karena selain factor geografis yang menghambat pencapaian, juga faktor ekonomi.

Tabel 3.2
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15-44
Tahun 2016

NO	KECAMATAN	15-44		
		L	P	L+P
1	Maritengngae	172	193	365
2	Panca.lautang	138	172	210
3	Panca.Rijang	37	35	77
4	Pitu Riase	84	151	235
5	Pitu Riawa	110	161	271
6	Dua pitue	297	429	726
7	Wt. Sidenreng	84	119	203
8	Watang Pulu	101	155	256
9	Baranti	59	30	89
10	Kulo	169	190	359
11	Tellu Limpoe	74	90	164
JUMLAH		1324	1725	3050

Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2016

Tabel 3.3
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 tahun keatas
Tahun 2016

NO	KECAMATAN	Melek		Jumlah
		L	P	
1	Maritengngae	60	80	140
2	Panca.lautang	0	0	0
3	Panca.Rijang	0	0	0
4	Pitu Riase	0	0	0
5	Pitu Riawa	0	0	0
6	Dua pitue	15	25	40
7	Wt. Sidenreng	0	0	0
8	Watang Pulu	0	0	0
9	Baranti	30	50	80
10	Kulo	0	0	0
11	Tellu Limpoe	0	0	0
JUMLAH		105	185	360

Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2016

3.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

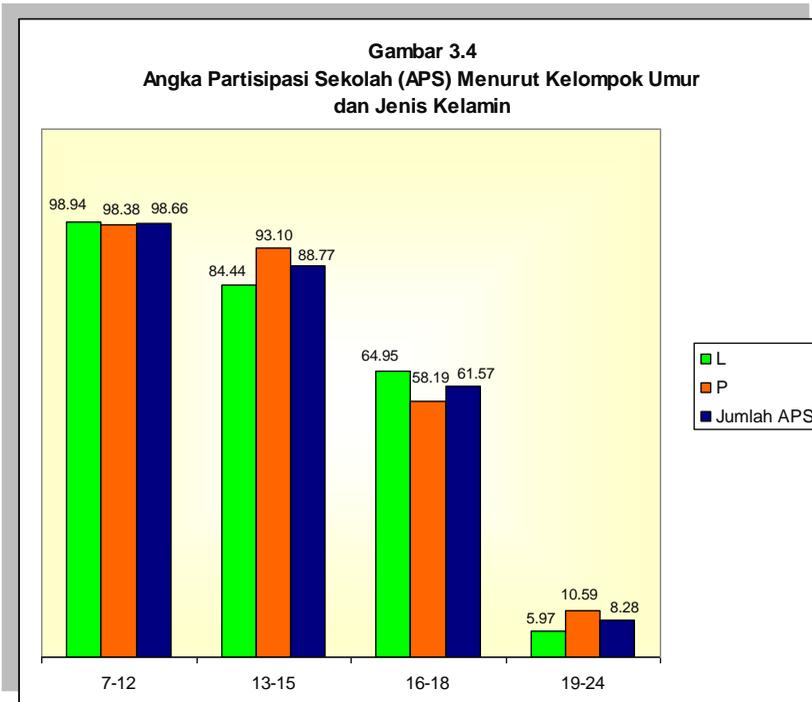
Angka partisipasi sekolah (APS) digunakan untuk mengukur banyaknya penduduk yang telah menerima pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu. Tabel dibawah menyajikan APS penduduk usia 7-18 tahun yang dibagi menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin.pada tahun 2016. Pencapaian APS masih menunjukkan semakin mengecil seiring dengan meningkatnya kelompok umur. (Tabel 3.4).

Tabel 3.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2016

NO	GOLONGAN UMUR	L	P	Jumlah APS
1	7 - 12	102,71	105,57	104,08
2	13 - 15	85,85	103	93,99
3	16 - 18	41,45	51,01	46,34
4	19 - 24	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2016

Rasio pencapaian APS sesungguhnya baik laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Hal ini juga dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini.



BAB IV BIDANG KESEHATAN

Peningkatan kesehatan perempuan merupakan bagian dari komitmen Pembangunan Millenium (MDGs). Ada tiga tujuan pembangunan yang terkait langsung dengan kesehatan perempuan, selain mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu meningkatkan kesehatan ibu, menurunkan angka kematian bayi, dan memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Maka dapat dipastikan bahwa kualitas hidup perempuan merupakan kondisi dasar yang ikut mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas generasi penerusnya. Secara akumulasi, kualitas hidup perempuan menentukan kualitas bangsa. Sebaliknya, kualitas kesehatan seorang ibu yang relatif rendah akan menghasilkan anak yang tumbuh kembangnya tidak sempurna. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kesehatan perempuan, antara lain dengan melakukan perbaikan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan perempuan.

Perbaikan gizi merupakan syarat utama untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, menurunkan angka kematian bayi dan balita, serta meningkatkan kemampuan tumbuh kembang anak, yang pada gilirannya untuk meningkatkan harapan hidup perempuan. Sementara faktor penting lainnya adalah adanya perhatian yang serius terhadap pelayanan kesehatan perempuan. Pelayanan ini meliputi kemudahan akses terhadap tempat pelayanan, penanganan kesehatan dengan tenaga yang profesional, penyuluhan tentang pemakaian alat kontrasepsi dan bahaya terhadap kesehatan perempuan seperti gangguan pada kehamilan (anemia, eklampsia, pendarahan, dan infeksi), HIV/AIDS, serta bahaya aborsi.

4.1. Angka Kematian Ibu Melahirkan (A K I) dan Angka Kematian Bayi (A K B)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai 3/4 resiko jumlah kematian ibu. Dari hasil survey yang dilakukan AKI telah menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan pembangunan milenium membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus.

Angka kematian bayi menggambarkan keadaan social ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan angka kematian bayi untuk pengembangan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Tabel 4.1
Angka kematian ibu (AKI) menurut Kecamatan Tahun 2014-2016

NO	KECAMATAN	ANGKA KEMATIAN IBU	
		2015	2016
1	Maritengngae	0	1
2	Panca.lautang	0	0
3	Panca.Rijang	0	0
4	Pitu Riase	1	0
5	Pitu Riawa	0	0
6	Dua pitue	0	0
7	Wt. Sidenreng	1	0
8	Watang Pulu	1	1
9	Baranti	1	0

10	Kulo	0	0
11	Tellu Limpoe	0	2
	JUMLAH	4	4

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB 2015-2016

Angka kematian bayi di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum menurun, dan penurunan yang signifikan mulai dari kurun waktu 2015-2016 yaitu dari 5 (lima) orang turun menjadi 4 (empat) orang. Penurunan ini diduga sebagai dampak positif dari pelaksanaan program di sektor kesehatan.

Tabel 4.2

Faktor Penyebab kematian ibu Menurut kecamatan tahun 2016

NO	KECAMATAN	PENYEBAB KEMATIAN IBU				
		PENDA- RAHAN	EKLAM -SIA	ABOR- TUS	INFEKSI	LAIN 2
1	Maritengngae	0	0	0	0	0
2	Panca.lautang	0	0	0	0	0
3	Panca.Rijang	0	0	0	0	0
4	Pitu Riase	0	0	0	1	0
5	Pitu Riawa	0	0	0	0	0
6	Dua pitue	0	0	0	0	0
7	Wt. Sidenreng	0	1	0	0	0
8	Watang Pulu	0	1	0	0	0
9	Baranti	0	0	0	1	0
10	Kulo	0	0	0	0	0
11	Tellu Limpoe	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	2	0	2	0

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Tahun 2016

Tabel 4.3

Faktor Penyebab kematian ibu Menurut kecamatan tahun 2016

NO	KECAMATAN	PENYEBAB KEMATIAN IBU				
		PENDA- RAHAN	EKLAM -SIA	ABOR- TUS	INFEKSI	LAIN2
1	Maritengngae	0	0	0	0	0
2	Panca.lautang	0	0	0	0	0

3	Panca.Rijang	0	0	0	0	0
4	Pitu Riase	0	0	0	0	0
5	Pitu Riawa	0	0	0	0	0
6	Dua pitue	0	0	0	0	0
7	Wt. Sidenreng	0	0	0	0	0
8	Watang Pulu	0	1	0	0	0
9	Baranti	0	0	0	1	1
10	Kulo	0	0	0	0	0
11	Tellu Limpoe	0	1	0	0	0
JUMLAH		0	2	0	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian & KB Tahun 2016

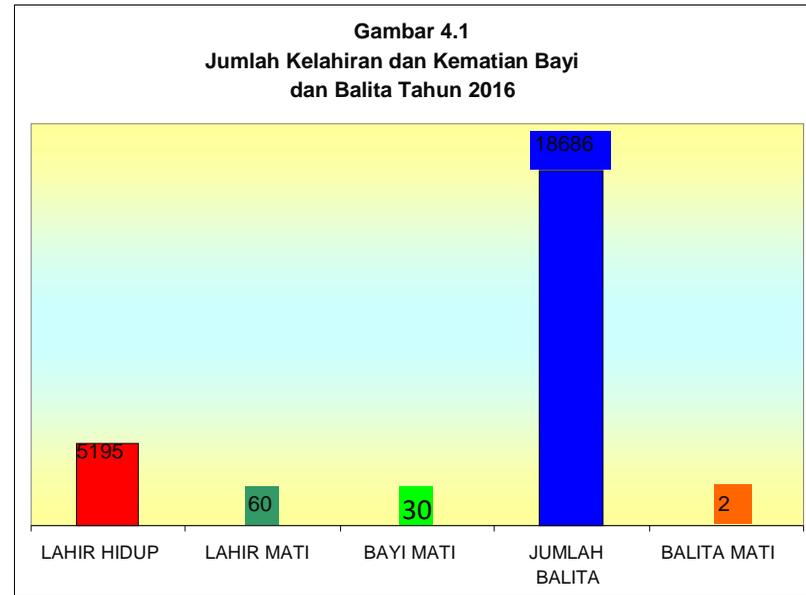
Sebagian besar penyebab kematian ibu hamil adalah perdarahan dan eklamsia dan apabila kondisi perdarahan dan eklamsia ini pada saat proses kelahiran tidak mendapat pertolongan atau tidak dibantu oleh tenaga medis maka resiko kematian ibu hamil akan semakin tinggi karena tidak mendapat tindakan medis yang diperlukan.

Tabel 4.4
Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita
menurut Kecamatan Tahun 2016

NO.	KECAMATAN	JUMLAH				
		LAHIR HIDUP	LAHIR MATI	BAYI MATI	JUMLAH BALITA	BALI TA MATI
1	Maritengngae	920	19	3	3445	-
2	Panca Lautang	297	1	1	1023	-
3	Tellu Limpoe	370	13	5	1342	-
4	Baranti	339	1	5	1113	-
5	Panca Rijang	498	2	4	1313	-
6	Kulo	215	2	1	640	-
7	Watang Pulu	622	5	4	2443	-
8	Wt. Sidenreng	344	2	1	1247	2
9	Dua Pitue	556	3	1	2202	-
10	Pitu Riawa	463	3	1	1860	-
11	Pitu Riase	359	5	1	1293	-
Jumlah		5195	60	30	18686	2

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB 2016

Hal ini dapat juga dilihat pada gambar 4.1 berikut ini.

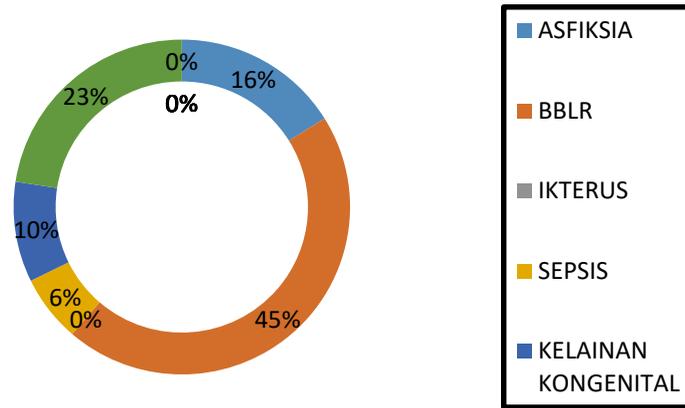


Tabel 4.5
Penyebab Kematian bayi tahun 2016

NO	PENYEBAB KEMATIAN BAYI	JUMLAH KEMATIAN BAYI
1	ASFIKSIA	6
2	BBLR	4
3	IKTERUS	0
4	SEPSIS	10
5	KELAINAN KONGENITAL	1
6	LAIN-LAIN	9
	JUMLAH	30

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Tahun 2016

Tabel 4.5
Penyebab Kematian bayi tahun 2016



BAB V BIDANG KETENAGAKERJAAN

Perempuan di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan, meskipun persentasenya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, dan struktur angka kerja perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Sebagian besar perempuan masih bekerja di sektor informal yang pada umumnya tidak memerlukan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dan khusus. Pekerjaan perempuan di sektor informal kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, di samping kondisi kerja yang memperhatikan dan rentan akan kekerasan, serta pendapatan yang relatif lebih rendah.

5.1. Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Sesuai dengan konsep dan batasan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Sementara angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, sementara tidak bekerja dan mencari pekerjaan. TPAK adalah untuk melihat persentase angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja.

Tabel 5.1
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Tahun 2015–2016

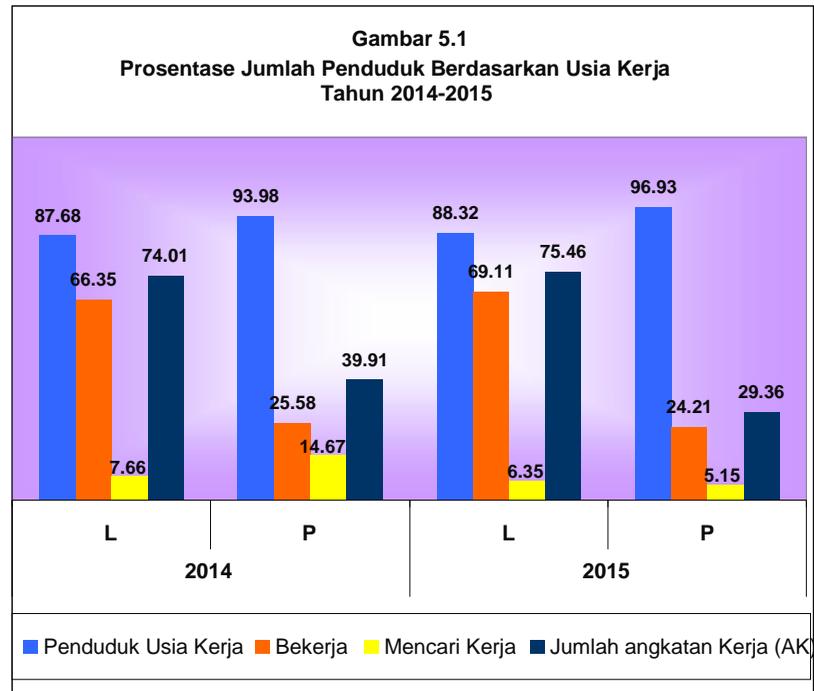
NO	URAIAN	2015		2016	
		L	P	L	P
1	Penduduk Usia Kerja	93.482	114.147	94.054	113.816
2	Bekerja	72.685	32.610	72.685	32.610
3	Mencari Kerja	3.229	3.728	969	104
4	Jumlah angkatan Kerja (AK)	75.914	36.338	75.914	36.338

5	% bekerja thdp angkatan kerja	95	89	95.74%	88.99.%
---	-------------------------------	----	----	--------	---------

Dinas Sosial & Nakertrans Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015-2016 TPAK perempuan sebesar 87 Persen, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 95 Persen pada tahun 2015. Dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2016 TPAK perempuan mengalami peningkatan, TPAK perempuan pada tahun 2016 menjadi 89 persen dan laki-laki menjadi 95 persen.

Hal ini juga dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut ini.



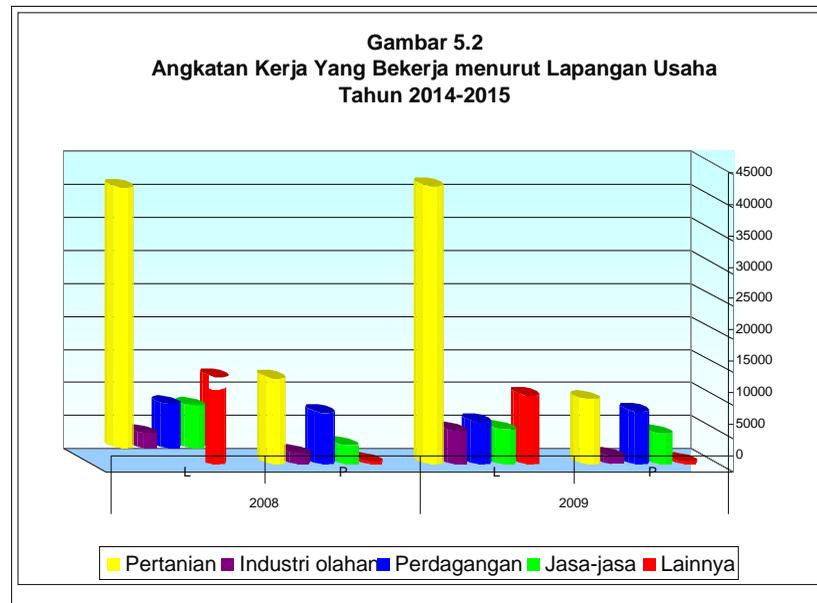
Tabel 5.2
Angkatan Kerja yang Bekerja menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2016

NO	LAPANGAN USAHA	2015		2016	
		L	P	L	P
1	Pertanian,kehutanan,perburuan,dan perikanan	25,009	19,251	41.569	4.281
2	Pertambangan dan pengolahan	865	641	856	641
3	Industri pengolahan	5,037	4,251	5.504	2.436
4	Listrik,Gas dan air	238	202	238	202
5	Bangunan	2,690	312	2.690	312
6	Perdagangan besar,eceran,rumah makan dan hotel	11,928	10,633	8.053	15.123
7	Angkutan,pergudangan dan komunikasi	5,535	2,305	5.536	2.305
8	Keuangan,asuransi,usahapersewaan bangunan,tanah dan jasa perusahaan	892	712	892	712
9	Jasa kemasyarakatan	8,103	7,019	9.324	4.090
	Jumlah	60.297	45.326	74.570	30.102

Dinas Sosial & Nakertrans Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

Pola yang sama juga terjadi pada tahun 2015-2016. Menunjukkan dimana sektor pertanian, dan perdagangan merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini diduga karena pengaruh Indonesia adalah Negara agraris dimana matapencarian utama masyarakat Indonesia adalah sektor pertanian.

Hal ini juga dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini.



BAB VI

SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA

6.1. Perempuan dan Kemiskinan

Indonesia masih mengalami persoalan yang serius dengan kemiskinan. Pada tahun 2007, Badan Pusat Statistik secara resmi mengumumkan bahwa sekitar 37 Juta jiwa (16,58%) penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan, jumlah tersebut 50 persen diantaranya adalah perempuan. Meskipun demikian angka tersebut telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2006. Pada tahun 2016 Penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 22.283. Pemerintah menargetkan bahwa persentase penduduk miskin tersebut akan turun menjadi 11,7 persen pada tahun 2016.

Pengertian kemiskinan dalam pendataan keluarga berdasarkan Undang-undang 10 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera terdiri dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I. Pengertian keluarga pra sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan kesehatan dan pendidikan, sedangkan pengertian keluarga sejahtera tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan seperti kebutuhan social psikologisnya (sosio psychological needs), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

Dari 11 kecamatan yang ada Di Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2015 Keluarga prasejahtera tertinggi berada di Kecamatan Tellu Limpoe, Pituriase dan Dua Pitue (tabel 6.1), masing-masing 1.839 dikecamatan tellu Limpoe, 1.563 di Kecamatan Pituriase dan 1.349 di Kecamatan Dua Pitue,

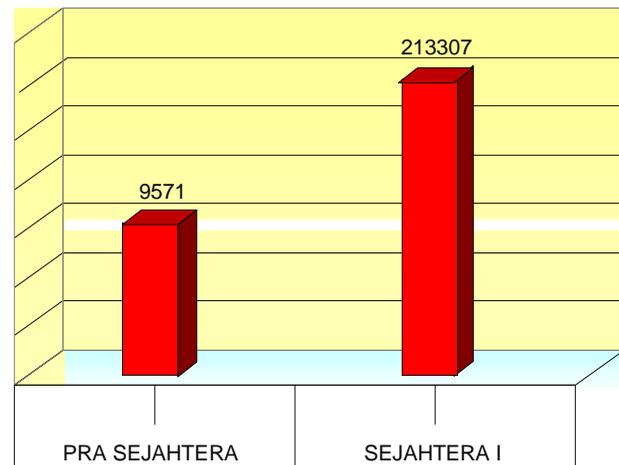
diantaranya juga terdapat penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dan gambar 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Jumlah Keluarga Prasehtera dan Sejahtera tahap I
Tahun 2016

NO	KECAMATAN	PRA SEJAHTERA	SEJAHTERA I
1	Maritengngae	1.149	3.175
2	Panca Lautang	524	1.779
3	Tellu Limpoe	1.656	1.425
4	Baranti	98	1.224
5	Panca Rijang	511	1.448
6	Kulo	254	858
7	Watang Pulu	288	2.421
8	Wt. Sidenreng	522	939
9	Dua Pitue	1.215	1.836
10	Pitu Riawa	1.022	2.296
11	Pitu Riase	1.413	1.936
	Jumlah	8.652	19.337

Sumber : Badan KB & PP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

Gambar 6.1
Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I Tahun 2016



6.2 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

Kepala keluarga terdiri dari kepala keluarga laki-laki dan kepala keluarga perempuan. Istilah kepala keluarga perempuan mungkin belum menjadi istilah umum di Indonesia karena dalam budaya dan maupun pengertian di berbagai agama, kepala keluarga adalah laki-laki. Namun dalam kenyataan, perempuan kepala keluarga jumlahnya tidak sedikit. Di Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menangani perempuan, kepala keluarga diperkirakan ada lebih 11.123 atau 16,84 persen perempuan kepala keluarga, yang tiap orang rata-rata menghidupi 2 (dua) atau 3 (tiga) anggota keluarga.

Mereka kebanyakan bekerja di sektor informal dan berpenghasilan sekitar Rp 10.000 perhari. Pada umumnya yang masuk dalam kategori ini adalah para janda yang ditinggal mati suami karena konflik atau meninggal karena sakit. Secara kultural di Kabupaten Sidenreng Rappang, biasanya para istri yang

ditinggal mati suaminya sering tidak berumah tangga dan bertahan hidup sendiri untuk membiayai anggota keluarga. Sementara sebaliknya, suami yang ditinggal mati istri dan bertahan hidup sendiri jumlahnya tidak banyak. Di samping para janda, yang masuk dalam kategori perempuan kepala rumah tangga adalah para istri yang ditinggal suaminya bekerja di luar daerah. Secara legal, status mereka masih menjadi istri, namun, secara ekonomi, karena kemiskinan, mereka harus menjadi kepala keluarga karena penghasilan suami tidak cukup untuk dikirimkan ke keluarga dan habis untuk mereka pakai sendiri di kota, sehingga perempuan menjadi penanggung jawab penuh kegiatan dan kebutuhan hidup sehari-hari di desa atau di kampung. Tipe lain perempuan kepala keluarga, adalah para perempuan yang menjadi korban poligami. Tabel 6.2, 6.3, 6.4 dan gambar 6.2 menunjukkan jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 6.2
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin
dan Status Pekerjaan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	2016		BEKERJA	TIDAK BEKERJA
		L	P		
1	Maritengngae	10842	2263	11242	1863
2	Wt. Sidenreng	4013	802	4225	590
3	Panca Rijang	5911	1223	6263	871
4	Kulo	2674	677	2725	626
5	Baranti	6461	1041	1548	5954
6	Watang Pulu	6927	1344	7178	1093
7	Pitu Riawa	6238	1067	6530	775
8	Pitu Riase	5261	947	5617	591
9	DuapituE	5962	1190	6160	982
10	Tellu LimpoE	5514	1179	6017	676
11	Panca Lautang	4082	961	4564	479

Jumlah	63875	12694	62069	14500
--------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Badan KB & PP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

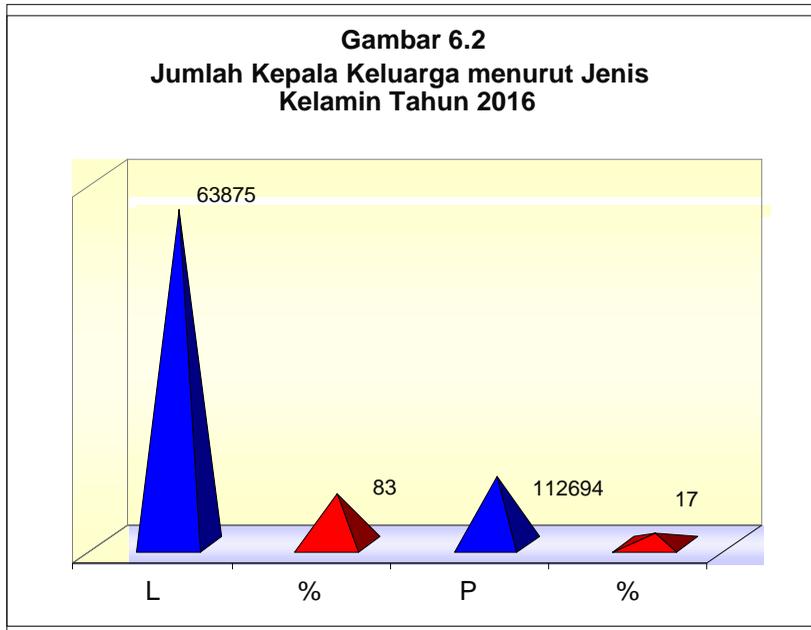
Tabel 6.3
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	TIDAK TAMAT	TAMAT SD-SMP	TAMAT SLTA	TAMAT S1
1	Maritengngae	2007	5654	3945	1429
2	Panca Lautang	1047	3036	741	219
3	Tellu Limpoe	1154	3998	1174	267
4	Baranti	823	3433	2592	654
5	Panca Rijang	543	3842	2014	737
6	Kulo	694	1922	579	156
7	Watang Pulu	1371	4700	1713	487
8	Wt. Sidenreng	1387	2807	528	93
9	Dua Pitue	853	4905	1093	291
10	Pitu Riawa	2009	4380	703	213
11	Pitu Riase	1526	3907	597	178
	Jumlah	13484	42582	15777	4724

Sumber : Badan KB & PP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

Tabel 6.4
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

NO	KECAMATAN	2016			
		L	%	P	%
1	PITU RIASE	5261	84	947	16
2	PITURIAWA	6238	85	1067	15
3	DUAPITUE	5952	83	1190	17
4	WT. SIDENRENG	4013	83	802	17
5	MARITENNGAE	10842	82	2263	18
6	PANJA RIJANG	5911	82	1223	18
7	BARANTI	6461	86	1041	14
8	KULO	2694	74	677	21
9	WATANG PULU	6927	83	1344	17
10	TELLULIMPOE	5514	82	1179	18
11	PANCALAUTANG	4082	80,9	961	20
	JUMLAH	63875	83	12694	17



Apabila dilihat pada tabel diatas, perempuan sebagai kepala keluarga tertinggi berada pada di Kecamatan Maritengae dan Kecamatan Watang Pulu. Kondisi ini diduga disebabkan oleh karena banyak istri ditinggal mati suami, sehingga mereka menjadi janda yang harus bertanggung jawab penuh pada kelangsungan hidup keluarga. Alasan lain adalah angka usia harapan hidup penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Adalah suatu kenyataan bahwa sumbangan perempuan dalam pembangunan adalah partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja dalam berbagai bidang kehidupan. Konsekuensi dari partisipasi tersebut nampak pula dari berbagai masalah yang dihadapi perempuan, lebih-lebih jika meningkat "peran ganda" dari wanita dalam berkeluarga. Misalnya sebagai tenaga kerja domestik (*domestic labour*) yang tidak mendatangkan hasil secara langsung. Dalam kedudukan tersebut memberikan dukungan bagi anggota

lain mencari nafkah untuk memanfaatkan peluang kerja yang ada. Posisi ini tidak lain, sebagian karena adanya pertimbangan sosial/structural. Di lain pihak, sesuai dengan perkembangan masyarakat khususnya di bidang perekonomian masyarakat yang agraris itu dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya, Nampak dengan nyata peran serta perempuan sebagai tenaga kerja di bidang pencarian nafkah yang mendatangkan hasil secara langsung.

6.2. Penduduk Lanjut Usia

Menjadi tua adalah pasti bagi semua penduduk, baik laki-laki maupun perempuan. Namun tua yang sejahtera, sehat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara tidak dialami oleh semua penduduk lansia. Menjadi lansia yang sehat dan sejahtera, sangat terkait dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan, pola hidup ketika masih muda, dan ekonomi dan kekayaan yang dimiliki, yang bisa diciptakan dari kebiasaan menabung dimasa muda untuk hari tua.

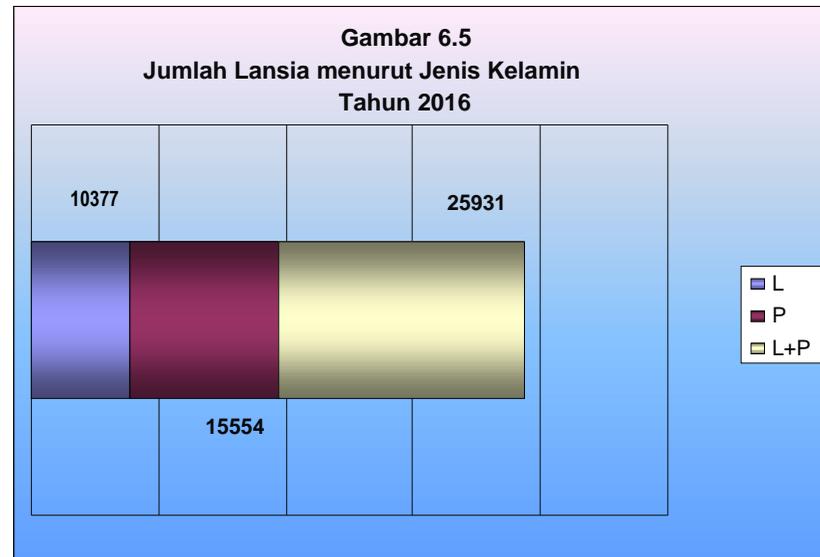
Penduduk lansia di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini seiring dengan membaiknya derajat kesehatan dan usia harapan hidup penduduk Indonesia. Namun demikian sebagian dari penduduk lansia baik menjelang dan masa lansia memiliki penyakit yang degenerative yang merupakan dampak pola hidup ketika masih muda. Faktor budaya ketika itu, masih banyak

Tabel 6.5
Jumlah Lansia Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

NO	KECAMATAN	LANSIA		JUMLAH
		L	P	
1	PITU RIASE	725	1087	1812
2	PITURIAWA	993	1488	2481
3	DUAPITUE	956	1434	2390
4	WT. SIDENRENG	566	847	1413
5	MARITENNGAE	1587	2380	3967
6	PANJA RIJANG	1058	1585	2643

7	BARANTI	960	1438	2398
8	KULO	642	962	1604
9	WATANG PULU	970	1455	2425
10	TELLULIMPOE	954	1431	2385
11	PANCALAUTANG	966	1447	2413
JUMLAH		10377	15554	25931

Sumber : Badan KB & PP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016



Jumlah penduduk lansia di Kabupaten Sidenreng Rappang terbanyak di Kecamatan Maritenggae dengan jumlah 1.587 orang laki-laki dan 2.380 perempuan dan yang paling rendah jumlah lansia terdapat di kecamatan Watang Sidenreng dengan jumlah 566 orang laki-laki dan 847 orang perempuan. Tingginya jumlah penduduk lansia perempuan terkait dengan angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.

6.3. Tingkat Partisipasi Keluarga Berencana

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keikutsertaan pria dalam be-KB, akan tetapi berdasarkan data yang ada di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan,

peseta KB pria hanya 5,7 persen atau hanya berjumlah 2.451 orang laki-laki saja, sebagaimana terlihat pada tabel 6.4 berikut ini.

Tabel 6.6
Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin
Menurut Alat/Cara KB yang sedang Digunakan/Dipakai
Tahun 2016

NO	ALAT/CARA KB YG DIGUNAKAN	Jumlah	%
1	Mow/Tubektomi	721	1,6
2	Mop/vasektomi	30	0,6
3	AKDR/IUD	1064	2,4
4	Suntikan/injection	19878	46,3
5	Pil KB/ Pil	16046	37,4
6	Susuk KB/ Implant	2670	6,2
7	Kondom/Comdom	2451	5,7
	Jumlah	42860	100

Sumber : Badan KB & PP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

BAB VII PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Dalam kondisi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang masih paternalistik, di mana tokoh panutan masih didominasi pria, keadaan ini membuat kaum perempuan harus bekerja keras untuk memasuki dunia politik. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi bagaimana meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislative dan partai politik lebih meningkat. Sedangkan posisi dan peran perempuan di lembaga eksekutif memberi gambaran bahwa kemajuan yang telah dicapai sampai saat ini ditandai dengan semakin banyaknya perempuan yang memegang jabatan politis.

Atas dasar kondisi tersebut, maka langkah yang harus ditempuh antara lain: perlunya meningkatkan komitmen seluruh komponen bangsa dalam mengaplikasikan peraturan perundang-undangan politik dan kepegawaian secara konsisten; melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan politik dan kepegawaian dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam kehidupan politik dan pemerintahan; dan meningkatkan pemahaman, kesamaan bahasa dan sensitifitas dan pemerintahan; serta memperluas jangkauan advokasi dan fasilitas kepada para penentu kebijakan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta seluruh komponen bangsa untuk mempercepat terwujudnya KKG.

7.1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam lembaga eksekutif (pemerintahan) ditunjukkan melalui eselonering atau jabatan struktual yang mereka jabat. Dalam pemerintahan eselonering dibagi menjadi 5 (lima) tingkat yaitu: eselon II, adalah eselon tertinggi didalam system kepegawaian pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Eselon II ini mempunyai kedudukan dalam pengambilan keputusan yang sangat strategis.

Pada tabel 7.1 menunjukkan komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jumlahnya, pegawai perempuan lebih banyak dari pegawai laki-laki dengan komposisi 109.730 perempuan dan 94.550 laki-laki.

Tabel 7.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2016

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	2016	3.655	2.865	1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab.Sidrap 2016

Tabel 7.2 Pada tahun 2016 menunjukkan perempuan yang menduduki jabatan stuktual eselon II ada 3 (tiga) orang, Dibandingkan jumlah laki-laki 26 orang. Jumlah ini sangat tidak berbanding jika melihat komposisi jumlah pegawai yang kebanyakan kaum perempuan daripada laki-laki. Pencapaian angka ini juga masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang sekarang justru lebih banyak perempuan dari pada laki-laki yaitu 134.388 orang perempuan dan 116.278 orang penduduk laki-laki. Demikian pula pada jabatan eselon III, kaum laki-laki mendominasi yaitu berjumlah 111 orang atau 89 persen sedang kaum perempuan hanya berjumlah 34 orang saja atau hanya 11 persen. Hal ini juga dapat dilihat pada gambar 7.1 berikut ini.

Tabel 7.2
Jumlah PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Dirinci
Menurut Eselon Dan Jenis Kelamin Tahun 2016

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	ESELON II A	-	1	1
2	ESELON II B	4	27	2
3	ESELON III A	15	42	3
4	ESELON III B	22	72	4
5	ESELON IV A	180	270	5
6	ESELON IV B	126	92	6
7	ESELON V A	13	10	7
8	ESELON V B	-	-	8
JUMLAH		360	514	874

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2016

Demikian pula pada tabel 7.3 Pada tahun 2016 menunjukkan perempuan yang menduduki jabatan stuktual eselon II tidak ada peningkatan yaitu tetap 1 (satu) orang atau sekitar 4,00 persen Dibandingkan jumlah laki-laki yang meningkat menjadi 27 orang atau sebesar 96,30 persen. Demikian pula pada jabatan eselon III, tidak ada peningkatan yang signifikan pada kaum perempuan dimana yang menduduki jabatan bertambah 2 orang menjadi 19 orang atau hanya 12 persen saja.

Sumber lain (Setkab) juga menyebut bahwa perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki yang menduduki jabatan struktural eselon II masih terjadi kesenjangan yang sangat signifikan.

Tabel 7.3
Jumlah PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Dirinci
Menurut Eselon Dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	ESOLON II A	-	1	1
2	ESOLON II B	4	27	2
3	ESOLON III A	15	42	3
4	ESOLON III B	22	72	4
5	ESOLON IV A	180	270	5
6	ESOLON IV B	126	92	6
7	ESOLON V A	13	10	7
8	ESOLON V B	-	-	8
JUMLAH		360	514	874

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2016

Selain *affirmative action* tentu juga upaya peningkatan kapasitas bagi pegawai perempuan. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pegawai laki-laki dan perempuan saat rekrutmen pegawai.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor selain faktor dominan yaitu sosial budaya patriarki mengakar kuat di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana perempuan adalah kelas dua. Faktor lain yang disebabkan peran domestik

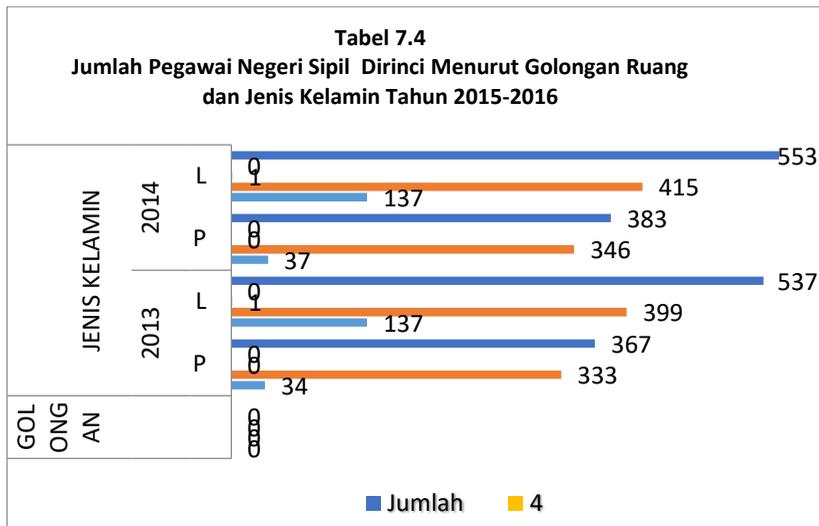
perempuan, yang mengganggu kiprah dan karirnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus melaksanakan *afirmative action* bagi perempuan dengan memberikan kuota bagi perempuan dalam menduduki jabatan terutama eselon II dan III pada setiap SKPD.

Berita gembira ditahun 2016 ini, data perOktober 2016 jumlah pegawai yang menduduki eselon II meningkat menjadi 3 orang atau bertambah sekitar 8 persen.

Tabel 7.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dirinci Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2016

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN	
		L	P
1	GOLONGAN IV	785	1
2	GOLONGAN III	1.096	2
3	GOLONGAN II	372	3
4	GOLONGAN I	68	4
Jumlah		2.321	5.464

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2016



Koposisi Pegawai Negeri Sipil dirinci menurut Jenis Kelamin Dan Golongan, pada dasarnya pegawai golongan III dan IV antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan, jumlah laki-laki golongan IV lebih banyak dari perempuan yaitu 137 orang dan perempuan yaitu 37 orang, tidak demikian dengan golongan III laki-laki berjumlah 415 orang lebih sedikit dari perempuan yaitu 346 orang, demikian pula dengan pegawai golongan II jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan yaitu masing-masing perempuan 0 orang dan laki-laki hanya 1 orang.

7.2 Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik yang dipersentasikan dalam lembaga legislatif tergolong rendah. Dari hasil pemilu 2016 lalu, perempuan yang sesungguhnya menjadi kelompok pemilih paling besar secara nasional tidak lebih dari komoditas politik. Kuota perempuan di parlemen sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Pemilu tidak tercapai karena berbagai persoalan mendasar. Suatu persoalan yang sangat berkaitan dengan kultur patriarki, bahwa aktifitas politik identik dengan laki-laki. Oleh sebab itu, sekalipun perempuan didorong untuk terlibat aktif dalam politik, partai politik sebagai wahana

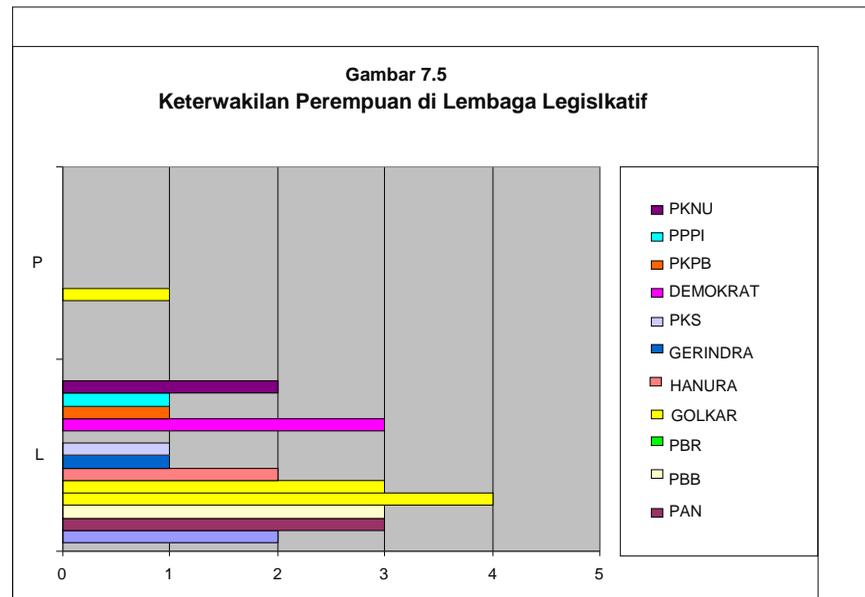
transformasi politik belum menunjukkan sifat akomodatif perempuan. Dalam pemilu 2016 lalu, nomor urut calon-calon anggota legislatif (caleg) perempuan ditempatkan nomor bawah. Situasi ini mendorong munculnya sebutan “caleg nomor sepatu” karena nomor urut caleg perempuan sekitar angka 36 dan seterusnya sesuai dengan ukuran sepatu.

Data Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang masih rendah, yaitu hanya 1 (satu) persen, sebagaimana terlihat pada tabel 7.5 dan gambar 7.3.

Tabel 7.5
Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
Tahun 2016

NO	PARTAI	L	P	TOTAL
1	PPP	2	0	2
2	PAN	3	0	3
3	PBB	2	0	2
4	NASDEM	4	0	4
5	GOLKAR	8	1	9
6	HANURA	2	0	2
7	GERINDRA	3	0	3
8	PKS	4	0	4
9	DEMOKRAT	4	0	4
10	PKPI	1	0	1
11	PKB	1	0	1
JUMLAH		34	1	35

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang 2016



Perkembangan baru tentang kebijakan pemerintah berkaitan dengan keputusan Mahkamah konsitusi dalam siding tanggal 23 Desember 2013 yang menghapuskan pasal 214 UU nomor 10 tahun 2013 tentang pemilihan umum anggota DPD, dan DPRD, caleg terpilih berdasarkan nomor urut berubah, menjadi suara terbanyak. Kebijakan ini perlu diantisipasi, dengan melakukan langkah-langkah yang mendorong kader perempuan partai untuk lebih mendekati konstituen, dan meningkatkan pengetahuan dan kualitasnya agar bersaing dengan caleg laki-laki, serta mendorong perempuan kader partai untuk lebih mempromosikan program-program yang berpihak kepada kepentingan perempuan dan turut memperjuangkan isu-isu perempuan.

7.2. Perempuan di Lembaga Yudikatif

Partisipasi perempuan dalam lembaga Yudikatif ditunjukkan melalui jabatan yang mereka jabat, apakah sebagai Hakim, Panitera, dan Jaksa. Dapat dilihat pada tabel 7.6 dibawah ini.

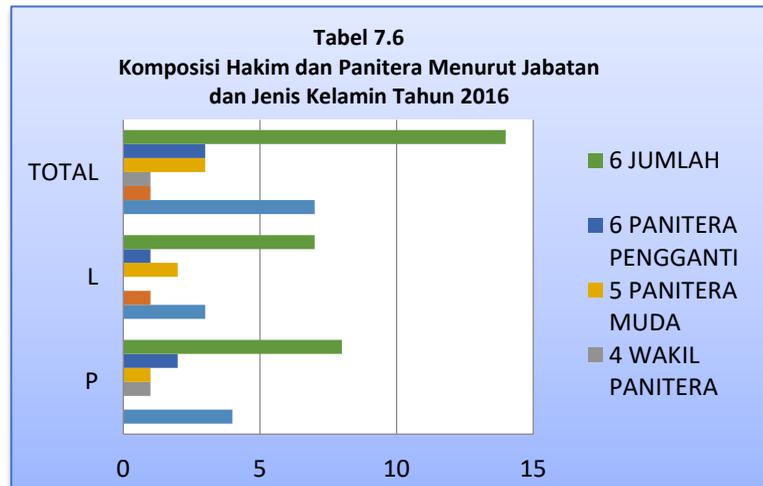
Tabel 7.6
Komposisi Hakim, Jaksa dan Panitera Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

NO	JENIS JABATAN	P	L	TOTAL
1	HAKIM	4	2	6
2	PANITERA	-	1	1
4	WAKIL PANITERA	1	-	1
5	PANITERA MUDA	1	2	3
6	PANITERA PENGGANTI	2	1	3
	JUMLAH	8	6	14

Sumber : Pengadilan Negeri & Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap 2016

Komposisi Hakim dan Panitera pada dasarnya tidak terdapat banyak perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan, walaupun jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki namun tidak terlalu mencolok perbedaannya, Dimana jumlah laki-laki 6 orang

atau 42 persen dari perempuan yaitu 8 orang atau 58 persen, sebagaimana pada gambar berikut ini.

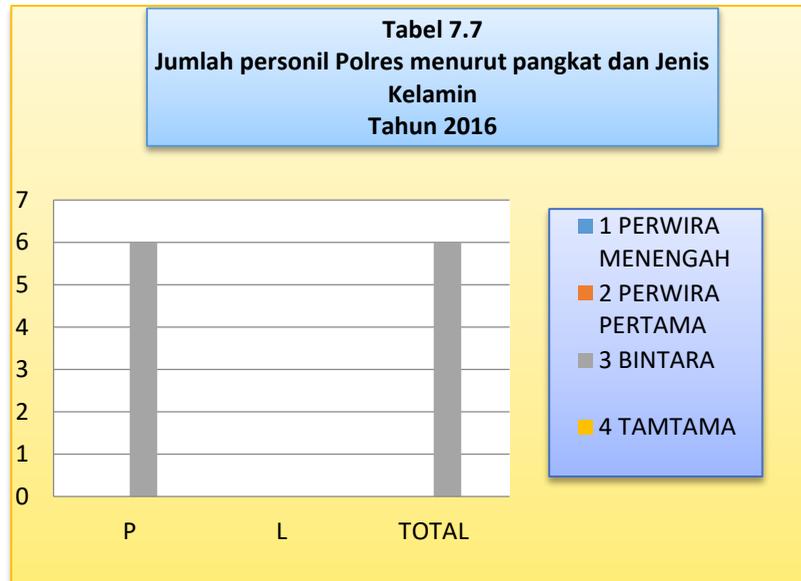


Tabel 7.7
Jumlah personil Polres menurut pangkat dan Jenis Kelamin Tahun 2016

NO	PANGKAT	P	L	TOTAL
1	AKBP		1	1
2	KOMPOL		4	4
3	AKP	1	19	20
4	IPTU	1	9	10
5	IPDA		14	14
6	AIPTU		111	111
7	AIPDA		22	22
8	BRIPKA	1	124	125
9	BRIGPOL	1	95	96
10	BRIPTU	3	10	13
11	BRIPDA	14	41	55
Jumlah		21	450	

Sumber : Polres Kab. Sidrap 2016

Pada Tabel 7.6 diatas dapat dilihat jumlah anggota Polres Sidenreng Rappang secara keseluruhan berjumlah 412 orang, dimana jumlahnya didominasi laki-laki yaitu 406 orang atau 98 persen dan anggota polres perempuan hanya 6 orang atau 2 persen saja, kondisi ini sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih banyak perempuan daripada laki-laki, juga dapat dilihat pada gambar 7.5 berikut ini.



BAB VIII KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

8.1. Pendahuluan

Indonesia telah hampir 25 tahun menyatakan komitmen internasionalnya terhadap pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Hal tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan dan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, serta diadopsinya Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*United Nations Declaration on Elimination of Violence against Women*) tahun 1993. Namun demikian, berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan terus terjadi, dan belum menjadi isu publik sampai dengan akhir tahun 1990an. Kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang terjadi terhadap perempuan, khususnya kelompok etnis tertentu, pada saat terjadinya kerusuhan Mei 1998 telah menggugah kesadaran masyarakat bahwa perempuan telah cukup lama mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan baik oleh individu maupun oleh Negara (Assegaf 2004).

Meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut diikuti dengan upaya-upaya untuk mengetahui jenis-jenis dan kedalaman tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sebagai contoh, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam laporan tahun 2005 mencatat peningkatan yang signifikan data jumlah perempuan yang melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dari 3,160 pada tahun 2001 menjadi 13,968 pada tahun 2004 (Komnas Perempuan 2005). Data yang dilaporkan Komnas Perempuan tersebut adalah rekaman kasus-kasus yang ditangani oleh beberapa organisasi perempuan, pengadilan negeri, pengadilan agama, Ruang Pelayanan Khusus, kejaksaan, dan rumah sakit di beberapa kota yang merespon kuesioner Komnas Perempuan. Survey tindak kekerasan terhadap perempuan, yang dipelopori oleh Kementerian Negara

Pemberdayaan Perempuan dan PBS, baru dilaksanakan pada tahun 2006.

8.2. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan seringkali disebut sebagai fenomena gunung es, di mana yang terlihat di permukaan, korban-korban yang melapor dan tercatat belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ada dua faktor utama yang diduga mempengaruhi fenomena tersebut. Pertama, terjadi dalam lingkup rumah tangga yang menganggap perempuan adalah isu sensitif. Hal terutama terjadi di lingkup rumah tangga yang menganggap hal tersebut adalah urusan pribadi dan tabu untuk dibicarakan secara terbuka di luar anggota rumah tangga. Selain itu, seringkali perempuan yang mengalami tindak kekerasan justru mendapat stigma buruk sebagai penyebab kejadian kekerasan terhadap dirinya, bukan sebagai korban. Berbagai tuduhan seperti perempuan genit, istri durhaka, dsb. Adalah stigma-stigma yang seringkali dilatarbelakangi oleh kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Hal ini secara psikologis membuat kaum perempuan enggan menceritakan tindak kekerasan yang dialaminya dan mencari pertolongan.

Kedua, lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan. Data-data yang dikumpulkan di berbagai tempat pelayanan bagi korban seperti rumah sakit, kantor polisi, dan LSM belum terkomiliasi secara sistematis. Selain itu, jumlah penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan masih terbatas, terutama untuk menggali isu-isu sosial dan ekonomi.

Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang-bidang utama pembangunan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipandang sebagai buah dari tidak dipenuhinya hak-hak perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan telah menghambat kebebasan dan keadilan bagi perempuan baik di rana publik maupun di rana domestik. Komitmen tahun 1980 tersebut selanjutnya dievaluasi pelaksanaannya di Negara-negara anggota

PBB dalam Konferensi Perempuan Dunia tahun 1985 di Nairobi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu hambatan perwujudan kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian, khususnya di Negara-Negara berkembang (United Nations 1995). Oleh karena itu, pada tahun 1993, Negara-negara anggota PBB sepakat untuk mengadopsi Deklarasi PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan sebagai upaya untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender. Dalam deklarasi tersebut, kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan, termasuk perkosaan dan trafficking, yang mengakibatkan perempuan menderita baik secara fisik, psikis, dan seksual, baik terjadi di rana domestic dan rana public.

Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan, antara lain: penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala POLRI tentang penyediaan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan yang terintegrasi, dan penandatanganan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Menteri Luar Negeri dan Menlu Negara-negara ASEAN lainnya pada tanggal 13 Juni 2004 (Komnas perempuan 2005). Tepat dua decade setelah diratifikasinya CEDAW, pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ayat 1 mencantumkan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

” ... setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (KNPP 2004b)”.

Pengesahan undang-undang tersebut adalah sebuah langkah maju, karena rumah tangga, yang selama ini dianggap

sebagai wilayah pribadi, sekarang sudah menjadi wilayah publik. Meskipun, masih banyak orang yang menganggap bahwa masalah cek-cok suami istri adalah tabu dan tidak dapat didiskusikan secara terbuka (*“One Stop Service” Korban Kekerasan Tidak Perlu Takut Lagi 2002*; boudre 2006). Masyarakat seringkali berpandangan bahwa ‘kekerasan yang terjadi antara suami-istri adalah persoalan dibalik pintu dan tidak patut didengar oleh orang (di) luar [rumah tangga]’ (Harrel 1982 dalam Gallin 1998, h. 153). Oleh karena itu, diperlukan upaya keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan

Upaya berkelanjutan untuk memperkenalkan konsep pemenuhan hak perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan korban kekerasan sangat diperlukan untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal tabu. Pradigma bahwa perlindungan adalah sebuah hak menuntut pemerintah, bekerjasama dengan lembaga masyarakat, untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, salah satu upaya nyata adalah ditetapkannya hak-hak korban kekerasan terhadap rumah tangga, sebagai mana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Hak-hak tersebut adalah setiap korban berhak mendapatkan (i) perlindungan dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga-lembaga sosial; (ii) pelayanan kesehatan yang memadai; (iii) perlindungan kerahasiaan; (iv) pelayanan dari pekerja sosial dan bantuan hukum dalam setiap investigasi; dan (v) pelayanan konseling (KNPP 2004b).

Tabel 8.1
Jumlah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun 2016

NO	BENTUK-BENTUK KEKERASAN	P	L
1	PENGANIYAAN	26	
2	PENCURIAN	1	
3	PENGRUSAKAN		
4	PENGEROYOKAN	3	
5	PEMERKOSAAN	2	
6	KDRT	16	
JUMLAH		47	

Sumber : Polres Kab. Sidrap 2016

Berdasarkan data dari Polres Sidenreng Rappang tabel 8.1 memperlihatkan bahwa ada sebanyak 126 perempuan dewasa yang pernah mengalami tindak kekerasan selama setahun terakhir.

Beberapa hasil kajian telah menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi, namun seringkali dapat ditolerir oleh sang korban, yang umumnya perempuan dan anak. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di rumah tangga seringkali membawa dampak psikologis yang cukup berat bagi korbannya.

Pasal 2 Undang-undang PKDRT mendefinisikan rumah tangga secara lebih luas dari konsep tradisional sebuah keluarga, yaitu terdiri dari suami, istri, dan anak. Lebih jauh, anggota keluarga lainnya dan orang lain yang tinggal dalam rumah tangga tersebut, misalnya pembantu rumah tangga, termasuk dalam lingkup jangkauan perlindungan Undang-Undang dimaksud (KNPP2004b). Pekerja rumah umumnya adalah perempuan, hal ini terkait dengan pembakuan peran gender bahwa pekerjaan memasak, mencuci,

dan dan membersihkan rumah adalah pekerjaan perempuan. Di perkotaan, yang umumnya adalah pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan, membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk masuk kedalam pasar kerja dan mempunyai pekerjaan yang baik (Sen 1998). Sehingga muncul kebutuhan yang cukup tinggi akan tenaga pengganti yang mengurus pekerjaan domestik para wanita karier tersebut (Phillips 1992, cited in Sen 1998, p. 38).

Kebijakan nasional terkait penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan orang, ditetapkan pemerintah dengan focus untuk menjamin diberikannya perlindungan bagi penduduk perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender. Selain itu, Rencana Aksi Beijing juga menggaris bawahi bahwa perempuan dan anak perempuan memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya disegala bidang termasuk hak perlindungan dari tindak kekerasan.

Permasalahan lain yang mengemuka adalah maraknya kejadian nikah sirih, di mana hak-hak perempuan sebagai istri tidak dilindungi oleh hukum formal. Pernikahan yang tidak terdaftar dalam catatan sipil ini statusnya lemah dalam hukum Negara. Ketidak patuhan (korban), perilaku buruk (pelaku) dan cemburu mempunyai kontribusi terjadinya tindak kekerasan yang relative sama.

Menurut Data Polres Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa lebih dari setengah kejadian kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami atau pasangan.). Tindakan kekerasan umumnya menyebabkan dampak psikologis bagi korban, yaitu korban merasa sakit hati, terluka, terhina, dan depresi dan sebahagiannya merasakan kerugian materi.

Suami atau pasangan sebagai pelaku utama kekerasan terhadap perempuan adalah gambaran umum tindak kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. pembakuan peran reproduksi perempuan menyabakan perempuan harus bertanggung jawab atas pengasuhan dan perawatan anak dan

keluarga. Kadang-kadang kekerasan yang dialami perempuan saat sedang hamil sampai setelah melahirkan.

BAB IX

KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

9.1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “anak” seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada usia tersebut mereka membutuhkan perlakuan khusus dan perlindungan dari orang dewasa. Konsep perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut beranjak dari hak-hak anak, yang merupakan bagian dari hak azasi manusia. Setiap anak memiliki hak dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup, yang meliputi hak untuk memperoleh standar hidup yang layak (papan, sandang, makanan bergizi, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan), tumbuh kembang, perlindungan dan berpartisipasi.

Upaya pemenuhan hak-hak anak tersebut sejalan dengan konsep pembangunan manusia, yang merupakan kunci pokok keberhasilan pembangunan, terutama pembangunan jangka panjang di semua bidang. Karena itu, untuk mencapai hasil yang optimal, pembangunan manusia harus mulai diperhitungkan sejak terjadinya konsepsi dan kehamilan. Kesehatan seorang bayi akan sangat bergantung pada status kesehatan ibu yang mengandungnya. Sehingga seorang perempuan dengan status gizi rendah, misalnya, berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Demikian pula seorang perempuan gizi buruk yang menyusui akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang

sedang disusunya. Padahal, proses penting pembangunan manusia pada masa anak-anak, karena pada masa itu seorang anak mulai bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Pada saat yang sama, ia memperoleh kesempatan sekaligus resiko untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas di masa yang akan datang, berbagai kebutuhan dan hak-hak dasar anak harus dapat dipenuhi sejak awal perkembangannya, utamanya dalam pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dan mulai memfokuskan pembangunannya pada kesejahteraan dan perlindungan anak. Hal ini terlihat dari telah diundangkannya perlindungan anak, dan walaupun dalam skala kecil, dibentuknya bab khusus tentang anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah. Namun demikian, berbagai indikator sektoral tentang anak belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan.

9.2. Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Perkembangan yang belum menggembirakan tersebut antara lain dapat terlihat dari aspek pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi anak, di mana jumlah kasus balita gizi buruk dan balita beresiko gizi buruk di Kabupaten Sidenreng Rappang masih terbilang tinggi walaupun dalam kurun waktu tersebut angkanya mengalami penurunan. Padahal, kualitas gizi anak akan sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan produktivitas anak. Sebagaimana terlihat pada Tabel 9.1 dan 9.2 berikut ini.

Tabel 9.1
Status Gizi Balita Menurut Jumlah Balita
dan golongan Status Gizi Tahun 2016

No	Puskesmas	Balita yang Diukur	Status Gizi							
			BB/U							
			LAKI-LAKI				PEREMPUAN			
			buruk	kurang	Baik	lebih	buruk	kurang	baik	lebih
1	Pangkajene	4399	25	177	1908	33	24	175	1951	46
2	Baranti	1158	3	60	509	14	0	54	513	5
3	Barukku	1163	3	33	551	3	1	26	543	3
4	Bilokka	1659	5	32	747	12	2	28	735	8
5	Kulo	1006	0	34	444	9	0	26	483	10
6	Manisa	883	5	47	403	7	5	38	372	6
7	Lawa woi	2932	34	109	1255	15	24	106	1373	16
8	Amparita	1960	11	101	885	4	9	88	586	6
9	Rappang	2380	8	63	1103	45	6	46	1080	29
10	Tanru Tedong	2417	3	67	1136	20	2	54	1123	12
11	Wt. Sidenreng	1449	5	97	566	30	6	50	678	17
12	Lancirang	1229	1	41	576	14	4	43	536	14
13	Dongi	1121	2	56	499	16	1	54	482	11
14	Belawae	324	0	13	152	0	0	10	149	0
Jumlah		23990	105	930	10734	222	84	798	10874	183

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Tahun 2016

Tabel 9.2
Jumlah Kasus Balita Gizi Kurang dan gizi buruk
Tahun 2015-2016

NO	KECAMATAN	BALITA DGN GIZI KURANG				BALITA BERISIKO GIZI BURUK			
		2015		2016		2015		2016	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pitu Riase	29	32			0	0		
2	Pitu Riawa	9	5			2	0		
3	Duapitue	21	24			0	1		
4	Wt. Sidenreng	20	11			1	1		
5	Maritengangae	75	91			0	0		
6	Panca Rijang	13	17			2	2		
7	Baranti	15	6			0	0		
8	Kulo	13	2			0	0		
9	Watang Pulu	11	10			1	1		
10	Tellu Limpoe	6	8			2	0		
11	Panca Lautang	24	9			1	0		
Jumlah		236	215			9	5		

Sumber : Dinas Kesehata, Pengendalian Penduduk & KB 2015-2016

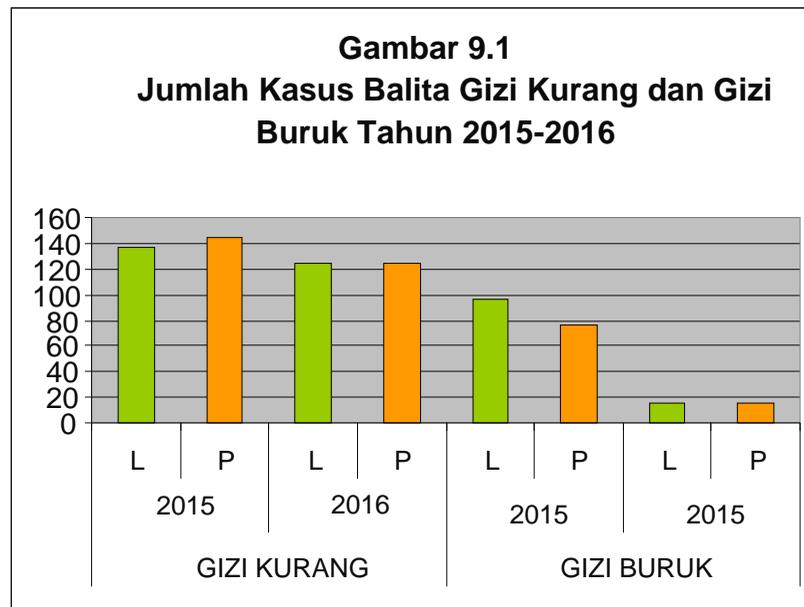
Jumlah kasus balita gizi kurang di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum menurun, dan penurunan yang signifikan, di tahun 2016 yaitu dari 581 orang balita dengan gizi kurang turun menjadi 451 orang pada tahun 2016. Pada Balita Berisiko gizi buruk juga mengalami kenaikan yaitu dari 10 orang pada tahun 2015 turun menjadi 15 orang ditahun 2016. Penurunan ini di duga sebagai dampak positif dari pelaksanaan program di sektor kesehatan utamanya **Program Kesehatan Gratis dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Jika dilihat dalam tabel diatas, jumlah kasus balita dengan gizi kurang dan gizi buruk mengalami *trend* menurun selama kurun waktu 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 jumlah kasus balita dengan gizi kurang yaitu 334 orang laki-laki dan 247 orang perempuan dan gizi buruk yaitu sebesar 6 laki-laki dan 4 orang perempuan. Dan

pada tahun 2015 menurun sebesar 236 orang laki-laki dan 215 orang perempuan. Program penanggulangan kasus balita dengan gizi kurang dan gizi buruk tersebut dapat dikatakan telah menunjukkan hasil yang memuaskan, oleh karena anak-anak yang berada dalam kelompok ini telah memperoleh perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang karena mereka sangat rentan untuk mengalami kasus gizi buruk, yang berarti pula akan semakin mengurangi jumlah potensi generasi muda yang cerdas dan berprestasi di masa yang akan datang. Hal ini juga berarti bahwa hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, seperti tertuang dalam UU No.23 tahun 2002. Secara sederhana, status gizi balita ini dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badan dengan rujukan standar yang telah ditetapkan. Jika berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak tersebut dapat dikategorikan menjadi anak dengan gizi yang baik, Namun apabila berat badan anak berada sedikit di bawah standar, maka anak tersebut dengan gizi kurang. Status gizi anak menjadi buruk jika berat badan anak beradiah jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Disebutkan pula bahwa masih tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada anak sangat terkait dengan masih tingginya bayi yang lahir dengan berat badan rendah (BBLR). Kasus BBLR biasanya sangat berhubungan dengan buruknya status gizi ibu yang mengandungnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya kasus gizi kurang dan buruk pada anak merupakan refleksi tingginya kasus status gizi buruk perempuan hamil.

Tingginya ketergantungan status gizi bayi dan anak pada ibu yang mengandungnya ini juga dapat dilihat dari indikasi prevalensi gizi kurang yang semakin tinggi ditemukan pada anak dengan ibu yang berpendidikan rendah, Rendahnya pendidikan seseorang, di mana dalam hal ini lebih banyak perempuan daripada laki – laki, merupakan salah satu penyebab utama miskin dan kurangnya informasi dan pengetahuan perempuan tentang berbagai hal, termasuk pengetahuan para ibu tentang gizi yang baik pada masa kehamilan dan pentingnya gizi bagi perkembangan bayi dan anak.

Tingginya jumlah kasus anak dengan gizi kurang dan gizi buruk ini merupakan masalah serius, karena akan sangat berdampak pada kualitas generasi mendatang. Pada umumnya, gizi kurang dan gizi buruk pada anak akan memperlambat pertumbuhan dan perkembangan mental serta penurunan kecerdasan anak. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan esensi pokok pembangunan, yaitu pembangunan manusia, yang menjadi kunci pokok keberhasilan pembangunan. Selain itu, investasi kesehatan dan gizi yang tepat pada anak akan mengurangi angka kesakitan dan kematian, serta menurunkan prevalensi kurang gizi yang berimplikasi pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.



9.3. Posyandu

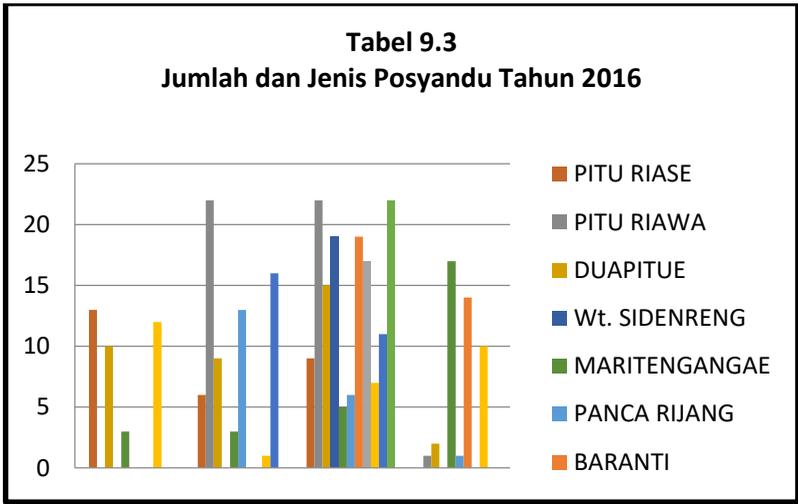
Wadah peran serta masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, yang tersebar luas di seluruh pelosok tanah air adalah Posyandu. Sebagai salah satu sistem penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar

peningkatan kualitas manusia yang secara empirik telah dapat pemeratakan pelayanan bidang kesehatan, seperti imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jumlah Posyandu di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 9.3 dan gambar 9.3 berikut ini.

Tabel 9.3
Jumlah dan Jenis Posyandu Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH POSYANDU			
		PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
1	PITU RIASE	13	6	9	0
2	PITU RIAWA	0	22	22	1
3	DUAPITUE	10	9	15	2
4	Wt. SIDENRENG	0	0	16	0
5	MARITENGANGAE	3	3	19	17
6	PANCA RIJANG	0	13	5	1
7	BARANTI	0	0	6	14
8	KULO	0	0	19	0
9	WATANG PULU	12	1	17	10
10	TELLU LIMPOE	0	16	11	0
11	PANCA LAUTANG	0	0	22	0
JUMLAH					

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Tahun 2016



9.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan agar semua anak usia dini (0-6 tahun), baik laki – laki dan perempuan, memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dan sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting dilakukan dalam proses pembangunan manusia, karena tahun pertama kehidupan anak merupakan kurun waktu yang sangat penting dan kritis dalam tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial. Sehingga keberhasilan tahun pertama anak pada umumnya akan sangat berkontribusi pada keberhasilan hari depan anak. Untuk itu, intervensi pelayanan social dasar untuk anak pada kelompok usia ini sangat krusial, sehingga harus mendapat perhatian khusus seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, agar tumbuh kembang anak Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berlangsung secara optimal.

Program PAUD tidak hanya memberikan manfaat optimal bagi anak usia dini tetapi juga bagi orang tuanya. Beberapa studi menyebutkan bahwa para orang tua dari anak yang mengikuti program cenderung memiliki tambahan anak yang lebih sedikit, lebih baik status gizi dan kurang merokok ketika hamil, tidak

melakukan tindak kekerasan dan menelantarkan anaknya, lebih tinggi angka penyelesaian sekolah, dan angka kelulusan pada jenjang pendidikan menengah atas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu untuk mengetahui potret jumlah anak pada kelompok usia dini 0-6 tahun, untuk kemudian melihat jumlah anak yang telah mendapat pelayanan social dasar program PAUD, serta jenis dan jumlah pelayanan program PAUD yang tersedia di masyarakat sebagai salah satu indicator penting keberhasilan program anak. Secara umum, jumlah anak berusia 0-6 tahun yang menjadi kelompok sasaran PAUD tidak banyak mengalami perubahan sepanjang tahun 2015 Seperti terlihat dalam tabel 9.4 berikut ini.

Tabel. 9.4
Jumlah anak usia dini

NO.	KOMPONEN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH
1.	PAUD	1,572	48,18	1,691	51,82	3,263
	a. Kelompok Bermain	1,445	47,81	1,558	52,19	3,043
	b. TPA	24	60,00	16	40,00	40
	c. Pos PAUD	0	0,00	0	0,00	0
	d. SPS	93	51,67	87	48,33	180
	e. TPQ	0	0,00	0	0,00	0
2.	KESETARAAN	398	45,33	480	54,67	878
	a. Paket A	0	0,00	0	0,00	0
	b. Paket B	398	45,33	480	54,67	878
	c. Paket c	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber :Dinas Pendidikan tahun 2016

Data yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah anak dalam kelompok usia PAUD ini berada pada kisaran 3.263, sepanjang tahun 2016 Jumlah anak 1.572 orang laki-laki dan 1.691 orang perempuan.

a. Kepemilikan Akte Kelahiran

Salah satu hak anak yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal ini berarti pula bahwa setiap anak berhak memperoleh akte kelahiran sebagai bukti identitas diri dan status kewarganegaraan dirinya. Tabel 9.5 berikut ini menggambarkan jumlah anak usia 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran.

Tabel 9.5
Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2016

Jumlah Balita		Jumlah	Kepemilikan Akte		Jumlah
L	P		L	P	
15.653	14.830	30.483	13.052	12.302	25.354

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidrap 2016

Peran pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini sangat besar dalam menyediakan pelayanan pemberian akte kelahiran secara gratis yang dapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat sampai pada tingkat kelurahan/desa, sehingga hak anak untuk memperoleh suatu nama sebagai identitas dirinya dan hak untuk memperoleh status

kewarganegaraan dapat terpenuhi, tanpa adanya diskriminasi status sosial dan ekonomi.

Faktor lain adalah kurangnya sosialisasi tentang pentingnya akte kelahiran bagi anak kepada masyarakat luas. Masih banyak masyarakat awam yang menganggap bahwa pencatatan kelahiran anak bukan merupakan suatu hal yang krusial, demikian pula halnya dengan kepemilikan akte kelahiran, yang dianggap kurang penting. Hal ini dapat pula diperburuk dengan rendahnya rata-rata pendidikan masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan orang tua, maupun orang-orang di sekitar tempat di mana anak itu dilahirkan untuk memenuhi hak anak atas identitas dirinya. Orang-orang di sekitar tempat anak dilahirkan, termasuk orang yang menyaksikan kelahiran dan/atau orang yang membantu proses kelahiran, maupun orang yang menemukan anak tersaebut, adalah mereka yang juga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak dasar seorang anak untuk dapat memperoleh identitasnya, selain orang tuanya, atau apabila orang tua anak tersebut tidak ada. Kurangnya sosialisasi tentang akte kelahiran anak ini juga menyebabkan keengganan keluarga miskin untuk mencatatkan kelahiran anaknya, karena dikhawatirkan pencatatan kelahiran seorang anak akan memerlukan prosedur yang rumit dan biaya yang seharusnya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarga.

b. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Karena sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi, orang tua dapat melalaikan kewajibannya. Namun demikian, kemiskinan bukanlah satu-satunya alasan adanya anak yang berhadapan dengan hukum. Berbagai *push factors* yang lebih bersifat internal keluarga dapat juga menjadi penyebab utama seorang anak berhadapan dengan hukum, khususnya adalah kekerasan yang dialaminya di dalam rumah dan ketidakharmonisan keluarga.

Tabel 9.6

**Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
yang Ditangani Polres Sidrap Tahun 2016**

NO	JENIS TINDAK PIDANA	L	P
1.	Pencurian		
2.	Penganiayaan	3	
3.	Pengeroyokan	2	
4.	Pembunuhan		
5.	Perjudian		
6.	Porno aksi / pornografi		
7.	Perbuatan cabul		
8.	Karena lainnya mengakibatkan meninggal dunia atau laka lantas		
	Jumlah	5	

Sumber : Polres Sidenreng Rappang Tahun 2016

**Tabel 9.7
Data Anak Korban Tindak Pidana
yang Ditangani Polres Sidrap Tahun 2016**

NO	JENIS TINDAK PIDANA	L	P
1.	Pencurian	1	
2.	Penganiayaan	7	2
3.	Pengeroyokan	4	1
4.	Pemerksaan		5
5.	Perbuatan cabul		3
6.	Penipuan		
7.	Pengelapan		
	Jumlah	12	11

Sumber : Polres Sidenreng Rappang Tahun 2016

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, Arizal dkk., 1998. **Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Rakyat: Pemanfaatan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Data Sosial Kependudukan Lainnya.** Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 1992. **Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia 1991 (SDKI).** Jakarta.
- , 1995. **Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia 1994 (SDKI).** Jakarta.
- , 1996. **Statistik Kesehatan 1995.** Jakarta.
- , 1997. **Sensus Ekonomi 1996.** Jakarta.
- , 1997. **Statistik Indonesia 1996.** Jakarta.
- , 1997. **Statistik Kesejahteraan Rakyat 1996.** Jakarta.
- , 1998. **Proyeksi Penduduk Per Propinsi 1995-2005.** Seri 7. Jakarta.
- , 1998. **Statistik Indonesia 1997.** Jakarta.
- , 1998. **Statistik Kesejahteraan Rakyat 1997.** Jakarta.
- , 1998. **Struktur Ongkos Usaha Hortikultura 1997.** Jakarta.
- , 1999. **Statistik Indonesia 1998.** Jakarta.
- , 1999. **Statistik Kesehatan 1998.** Jakarta.
- , 1999. **Statistik Kesejahteraan Rakyat 1998.** Jakarta.
- , 2000. **Statistik Indonesia 1999.** Jakarta.
- , 2000. **Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999.** Jakarta.
- , 2000. **Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999.** Jakarta.
- , 2014. **Sidenreng Rappang Dalam Angka 2014.** Sidenreng Rappang.

